

Tabel 1.3

Struktur Pengurus FSPMI

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPMI		
Presiden: Ir. H.Said Iqbal, ME.	Sekretaris Jenderal : Suparno B.	Bendahara Umum: Judy Winarno, ST.
❖ Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE)		
• Ketua Umum : Suhadmadi, SE.		
• Sekretaris Umum : Judy Winarno, ST		
❖ Serikat Pekerja Automotif Mesin&Komponen (SPAMK)		
• Ketua Umum : Rustan, ST.		
• Sekretaris Umum : Muhidin, SS.		
❖ Serikat Pekerja Logam (SPL)		
• Ketua Umum : HM. Yadun Mufid, SE.		
• Sekretaris Umum : Sabilar Rosyad		
❖ Serikat Pekerja Perkapalan Jasa Maritim (SPPJM)		
• Ketua Umum : H. Makmur Komarudin		
• Sekretaris Umum : Mukiswara, SH., MH.		
❖ Serikat Pekerja Aneka Industri (AI)		
• Ketua Umum : Obon Tabroni, SE.		
• Sekretaris Umum : Djamaludin Malik		

1. Mengorganisir pekerja yang belum terorganisir dengan target jumlah anggota 250.000 orang dan 500 unit kerja sampai tahun 2011
 2. Memperkuat dan mengoptimalkan fungsi sekretaris jenderal, SPA dan audit sebagai prinsip dan tata kelola keuangan dan kinerja organisasi yang transparan dan bertanggungjawab
- Ekonomi dan Kesejahteraan
 1. Mempromosikan terwujudnya undang-undang pengupahan sebagai acuan sistem pengupahan layak nasional dan sistem upah sektoral
 2. Memperjuangkan terlaksananya jaring pengaman sosial melalui sistem Jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan
 3. Mendorong tumbuhnya koperasi pekerja disetiap perusahaan
 4. Membentuk Induk Koperasi Buruh Metal Indonesia (INKOPBUMI) dan membuat kode etik usaha
 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 1. Mensosialisasi undang-undang dan peraturan K3
 2. Menyelenggarakan Lokakarya dan pelatihan K3 sesuai prioritas
 3. Melakukan monitoring dan pembentukan tim pelaksanaan K3 di tempat kerja
 - Konsolidasi Keuangan

1. Mendorong disiplin anggota dalam membayar iuran sebesar 1% dari upah
 2. Konsisten melaksanakan keputusan Kongres II tentang mekanisme pembayaran iuran anggota
 3. Menyusun program anggaran penerimaan dan pengeluaran organisasi serta profesionalisme administrasi
 4. Menyusun dan menyiapkan data keuangan untuk auditor sebagai laporan dan mengoptimalkan fungsi bendahara
 5. Membuat PO tentang keuangan Organisasi dan laporan tahunan keuangan organisasi
- Pengembangan Kemampuan Informasi & Komunikasi
 1. Mempromosikan seluruh perangkat organisasi memiliki perangkat keras dan perangkat lunak penunjang komunikasi
 2. Menerbitkan brosur, buletin serta mendokumentasi kegiatan organisasi
 3. Aktif membangun komunikasi dengan perangkat organisasi perburuhan lainnya di tingkat Nasional dan International
 - Pendidikan, Pelatihan dan Kaderisasi
 1. Menyusun pedoman kurikulum dan silabus pendidikan
 2. Mencetak juru didik yang standar

manusia. Demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Begitu juga dengan masyarakat industri kelas pun tercipta di dalamnya. Kelas borjuis dalam masyarakat industri adalah pemilik perusahaan. Kelas proletar adalah para buruh. Hendaknya kita sebagai masyarakat membentuk suatu kekuatan yang ditujukan untuk kedigdayaan masyarakat sipil agar dapat melakukan perlawanan terhadap pemilik kekuasaan. Organisasi atau serikat adalah suatu perkumpulan orang yang mempunyai tujuan dalam bermasyarakat. Organisasi atau serikat inilah merupakan jawaban dari perlawanan dalam penindasan. Orang yang mengikuti suatu organisasi biasa disebut aktivis. Dari organisasi inilah muncul kekuatan masyarakat dari berbagai elemen. Mulai dari aktivis hak asasi manusia (HAM), aktivis mahasiswa, aktivis buruh, dan lain-lain. Inilah orang-orang yang termasuk ke dalam kelas proletar dengan membentuk suatu kekuatan dalam bermasyarakat.

Buruh menunjukkan kekuatannya dengan membentuk serikat pekerja atau serikat buruh seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang mempunyai cita-cita untuk kesejahteraan kaum buruh. Untuk peran FSPMI dalam mewujudkan kesejahteraan kaum buruh peneliti menemui Bapak Agus Suprianto selaku ketua FSPMI cabang Sidoarjo.

“Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini dalam peran politiknya yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat industri menjalin hubungan dengan beberapa fraksi partai politik yang ada di Indonesia. Contohnya dengan fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kita FSPMI melakukan perjanjian politik dengan fraksi tersebut. Kita cuman meminta terealisasinya kesejahteraan buruh terhadap

<ul style="list-style-type: none">• Kaset Kaki
<ul style="list-style-type: none">• Sprei dan sarung bantal
<ul style="list-style-type: none">• Meja dan kursi Plastik
<ul style="list-style-type: none">• Lemari pakaian Non Kayu Jati
<ul style="list-style-type: none">• Hanger
<ul style="list-style-type: none">• Korden
<ul style="list-style-type: none">• Sapu Ijuk
<ul style="list-style-type: none">• Sapu lidi
<ul style="list-style-type: none">• Kain Pel
<ul style="list-style-type: none">• tempat Sampah
<ul style="list-style-type: none">• Pengki
<ul style="list-style-type: none">• Rak Piring
<ul style="list-style-type: none">• Perlengkapan makan, antara lain Piring makan, Gelas minum, Sendok dan garpu, Sendok Nasi, Mangkok, Meja dan kursi makan
<ul style="list-style-type: none">• Pisau Dapur
<ul style="list-style-type: none">• Gunting
<ul style="list-style-type: none">• Talenan
<ul style="list-style-type: none">• Ceret alumunium
<ul style="list-style-type: none">• Wajan alumunium
<ul style="list-style-type: none">• Panci aluminium
<ul style="list-style-type: none">• Sendok masak
<ul style="list-style-type: none">• kompor gas

ini bisa dipecahkan di dalam pemahaman kita, yakni di dalam pikiran-pikiran kita. Bagi Marx, kontradiksi-kontradiksi ini benar-benar ada, dan tidak dapat dipecahkan oleh filsuf yang hanya duduk di belakang meja tulisnya, melainkan perjuangan hidup dan mati demi mengubah dunia social. Dialektika lebih membawa kita kepada minat untuk mengkaji konflik dan kontradiksi-kontradiksi, yang terjadi di antara berbagai level realitas social ketimbang minat sosiologi tradisional terhadap level-level yang saling berhubungan dengan teratur dengan suatu keseluruhan yang kohesif.

Sebagai contoh, salah satu kontradiksi dalam kapitalisme adalah hubungan antara para pekerja dan para kapitalis pemilik pabrik-pabrik dan sarana-sarana produksi lainnya yang digunakan untuk bekerja. Kapitalis harus mengeksploitasi para pekerja untuk memperoleh keuntungan dari kerja para pekerja. Para pekerja, berlawanan dengan para kapitalis, ingin memperoleh setidaknya sedikit keuntungan tersebut untuk diri mereka. Marx yakin bahwa kontradiksi ini terletak di jantung kapitalisme, dan bahwa hal ini akan tumbuh lebih buruk seiring dengan usaha kapitalis menggerakkan lebih banyak orang untuk menjadi pekerja dengan memaksa firma-firma kecil di luar bisnis dan seiring terjadinya kompetisi antara kapitalis yang melawan mereka untuk melakukan eksploitasi selanjutnya terhadap para pekerja untuk mendapatkan keuntungan. Karena meluasnya kapitalisme, maka jumlah pekerja yang dieksploitasi pun meningkat sebagaimana meningkatnya eksploitasi. Kontradiksi ini tidak dapat ditanggulangi dengan filsafat, melainkan dengan perubahan social. Kecenderungan meningkatnya level eksploitasi melahirkan lebih banyak

manusia dalam bekerja menjalankan fungsi-fungsi hewaniannya. Buruh yang dalam hitungan standart pengupahan hanya diformulasikan tempat tinggal ukuran 3x3 meter ini sama dengan hewan yang memiliki kandang sempit lalu hanya bisa kerja untuk pengembala hewan, makan, minum, melakukan kegiatan reproduksi dan sebagainya.

Kedua, pekerja tidak hanya teralienasi dari aktivitas-aktivitas produktif, akan tetapi juga dari tujuan aktivitas-aktivitas tersebut-produk. Produk kerja mereka tidak menjadi milik mereka, melainkan menjadi milik para kapitalis yang mungkin saja menggunakan cara-cara yang mereka inginkan, karena produk merupakan hak milik pribadi para kapitalis. Marx menyatakan kepada kita: “ Hak milik pribadi merupakan produk, hasil, dan dampak-dampak yang punya nilai dan harga yang dihasilkan dari kerja yang teralienasi.” Kapitalis akan menggunakan hak miliknya untuk menjual produk demi mendapatkan keuntungan.

Masalah yang saat ini dihadapi dalam masyarakat industri adalah berjuang dalam isu-isu Nasional. Isu-isu nasional tersebut mulai dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 78/2015, Pergub Jatim No. 68/2015 tentang UMK 2015, dan mengesahkan Perda Jatim tentang perlindungan Pekerja/ Buruh. Tuntutan yang pertama adalah mencabut Peraturan Pemerintah No. 78/2015. Dari PP tersebut terdapat formulasi pengupahan yang menurut buruh itu sudah diluar standart kehidupan layak bagi buruh. Standart kehidupan layak bagi buruh inilah yang dimaksudkan dalam unsur alienasi kedua dalam teori Marx.

Buruh menuntut hak dalam proses pengupahan. Pengupahan termasuk hak milik pribadi buruh karena hak milik pribadi buruh yang merupakan dampak-dampak nilai keuntungan dari perusahaan dan harga yang dihasilkan dari bekerja. Tuntutan Perda Perlindungan Pekerja juga merupakan hak milik pribadi yang dimiliki oleh buruh demi menjamin keselamatan dalam bekerja. Apabila dalam suatu perusahaan buruh tidak memperoleh jaminan keselamatan dalam bekerja maka buruh tersebut teralienasi dalam hak perlindungan buruh dalam bekerja.

Konflik Kelas

Di dalam kapitalisme, analisis Marx menemukan dua kelas utama: borjuis dan proletariat. Borjuis adalah nama yang diberikan Marx untuk kaum kapitalis di dalam ekonomi modern. Kaum borjuis memiliki alat-alat produksi dan mempekerjakan tenaga kerja upahan. Konflik diantara kaum borjuis dan kaum proletariat adalah contoh lain kontradiksi material yang nyata. Kontradiksi itu bertumbuh dari kontradiksi yang sudah disebutkan sebelumnya, diantara tenaga kerja dan kapitalisme. Tidak satupun dari kontradiksi-kontradiksi tersebut yang dapat dipecahkan selain dengan mengubah struktur kapitalis. Sebenarnya, sampai terjadi perubahan, kontradiksi akan semakin memburuk. Masyarakat akan semakin terpolarisasi kedalam kedua kelas besar yang bertentangan itu. Selain itu, karena kaum kapitalis telah menyusutkan para pekerja menjadi mesin-mesin untuk bekerja melaksanakan serangkaian operasi sederhana, mekanisasi menjadi

semakin mudah. Sewaktu mekanisasi terus berlanjut, semakin banyak orang yang menganggur dan jatuh dari kaum proletariat menjadi pasukan cadangan industri. Pada akhirnya, Marx meramalkan situasi masyarakat akan dicirikan oleh segelintir kaum kapitalis yang mengeksploitasi dan massa kaum proletar yang sangat banyak dan para anggota pasukan cadangan industri. Dengan memerosokkan begitu banyak orang ke dalam kondisi seperti itu, kapitalisme menciptakan massa yang akan menyebabkan penumbangannya. Sentralisasi pekerja pabrik yang semakin bertambah, dan juga penderitaan yang dirasakan bersama, meningkatkan kemungkinan munculnya perlawanan terorganisir kepada kapitalisme. Selanjutnya, pertautan internasional pabrik-pabrik dan pasar-pasar mendorong para pekerja semakin sadar atas kepentingan-kepentingan mereka selain dari kepentingan-kepentingan lokal. Kesadaran itu kemungkinan besar menyebabkan revolusi.

Kaum kapitalis, tentu saja, berusaha mencegah revolusi itu. Misalnya, mereka mensponsori petualangan-petualangan kolonial dengan tujuan mengalihkan setidaknya beberapa beban eksploitasi dari front dalam negeri ke koloni-koloni. Akan tetapi, menurut Marx, usaha-usaha tersebut ditakdirkan gagal karena kaum kapitalis sangat dikendalikan oleh hukum-hukum ekonomi kapital sebagaimana para pekerja. Kaum kapitalis berada di bawah tekanan persaingan antara satu sama lain, yang memaksa mereka untuk mencoba mengurangi biaya-biaya tenaga kerja dan memperhebat eksploitasi-meskipun eksploitasi yang diperhebat itu akan menambah kemungkinan revolusi

Jawa Timur ini. Surat itu berisi tentang tuntutan-tuntutan buruh. Apabila dari aksi mogok nasional itu nihil hasilnya, maka aksi yang dilakukan adalah aksi turun jalan. Dalam aksi turun jalan ini bukan dari pihak FSPMI saja. Pihak FSPMI juga mengajak SPSI, SBSI, dalam melakukan aksi turun jalan di depan gedung Graha Surabaya. Dalam aksi turun jalannya terkadang bisa bertemu dengan Gubernur Jawa Timur untuk mengajak diskusi langsung, terkadang juga tidak bisa bertemu dengan bapak Gubernur untuk berdiskusi. Apabila dalam tuntutan tidak terpenuhi, maka lanjut aksi mogok kerja secara Nasional jilid 2 buruh serentak se-Jawa Timur. Aksi mogok nasional jilid 2 tidak juga didengarkan maka selanjutnya melakukan aksi turun jalan kembali. Dalam aksi turun jalan kembali FSPMI bertemu Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Universitas Airlangga (UNAIR) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Kebetulan tuntutan aktivis mahasiswa dengan aktivis buruh ini sama. Sama-sama mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 dan merevisi Peraturan Gubernur Tentang UMK. Untuk aksi turun jalan yang kedua ini nihil juga hasilnya dengan tuntutan aktivis buruh dan aktivis mahasiswa, maka tindakan FSPMI ini merangkul jurnalis untuk membuat acara di Televisi membahas isu-isu Nasional yang sedang dialami kaum buruh. Dalam acara tersebut FSPMI juga mengajak aktivis GMNI UNAIR dan aktivis GMNI ITS. Setelah membuat acara diskusi membahas isu-isu Nasional yang dialami kaum buruh, FSPMI juga melanjutkan aksinya mogok kerja secara Nasional yang diberi

judul “Mogok Nasional Jilid 3” dengan segala tuntutan. Lalu dilanjutkannya kembali aksi turun jalan yang ketiga kalinya. Jalan terakhir ketika aksi turun jalan yang ketiga ini tuntutan buruh dihiraukan maka FSPMI mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Final dari perjuangan FSPMI adalah keputusan dari Mahkamah Agung (MA). Peran FSPMI dalam menghadapi isu-isu nasional diatas adalah contoh konflik kelas Karl Marx. Konflik antara kelas Borjuis dengan Kelas Proletar. Pemerintah dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) termasuk kedalam kategori kelas borjuis. Sedangkan yang melakukan aksi turun jalan seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Metal, aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) termasuk kedalam kategori kelas proletar atau kelas perjuangan. Aksi tersebut merupakan hasil kontradiksi antara pihak kelas borjuis dengan pihak proletar. Pemerintah memaksa menetapkan upah yang sedikit untuk pekerja. Sedangkan buruh menganggap upah tidak sesuai dengan standart kebutuhan hidup layak.